

Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019

Failure of Patronage-Clienttelism Practice in The Village Heads Elections at Klaten District in 2019

Juang Gagah Mardhika^{1)*}, Rina Martini²⁾ & Fitriyah²⁾

1)Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 16 April 2021; Direview: 16 April 2021; Disetujui: 16 Mei 2021

*Corresponding Email: juanggagahmardhika1987@gmail.com

Abstrak

Studi tentang patronase-klientelisme pada tingkat Pemilihan Kepala Desa masih menjadi diskursus penting. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kekalahan petahana dan kegagalan praktik patronase-klientelisme pada Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Randusari, Desa Jombang, dan Desa Jiwowetan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, Informan penelitin dipilih secara purposive, terdiri dari calon kepala desa, tim sukses, dan pemilih. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Randusari, Jombang dan Jiwowetan 2019 sarat praktik patronase-klientelisme. Jenis patronase-klientelisme yang digunakan cukup beragam berdasarkan jenis, maupun aktor yang berhubungan langsung dengan pemilih. Praktik patronase-klientelisme pada ketiga Desa, tidak mampu mendorong kandidat petahana memenangkan hasil Pilkades tersebut. Para penantang berhasil mengeksplorasi keterbatasan dan kutukan yang ada pada diri petahana. Sehingga mampu merubah perilaku memilih masyarakat melalui pendekatan psikologis, sosiologis dan pilihan rasional.

Kata Kunci: Patronase Klientelisme; Pemilihan Kepala Desa

Abstract

The study patronage-clienttelism at the level Village Head Selection is still an important concern. Therefore, this study aims to explain the phenomenon of incumbent defeat and the failure patronage-clienttelism practices in the 2019 Village Head Elections in Klaten Regency. This study uses qualitative method with case study approach in Randusari Village, Jombang Village, and Jiwowetan Village. Data collection using interviews and documentation studies, informants are selected purposively, consisting prospective village heads, successful teams, and voters. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that Village Head Elections Simultaneously Randusari, Jombang and Jiwowetan 2019 are full of patronage-clienttelism practices. The types of patronage-clienttelism used vary quite by type, as well as actors who are directly related to the electorate. The practice patronage-clienttelism in all three villages, was unable to encourage the incumbent candidate to win the election result. The challengers managed to explore the limitations and cursess that exist in the incumbent. So that it is able to change the behavior of choosing society through psychological, sociological and rational choices.

Keywords: Patronage Clientelism; Village Head Election

How to Cite: Mahardika, J. G., Martini, R. & Fitriyah, F. (2021). Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 296-305.



PENDAHULUAN

Studi tentang petahana masih menjadi diskursus penting, sebab objek kajiannya tidak pernah mengalami kekosongan. Kondisi tersebut, melihat peran aksesibilitas kandidat petahana dalam term politik distributif, memanfaatkan program yang bersifat programatik maupun non-programatik sebagai upaya mobilisasi massa (Harahap, 2019). Beberapa studi menjelaskan peran kebijakan yang menguntungkan kandidat petahana dan partai pemerintah, misalnya, kebijakan *conditional cash transfer Bolsa Familia* di Brazil (Hall, 2008; Hunter dan Sugiyama, 2013) dan bantuan-bantuan sosial yang secara umum menguntungkan pemerintahan di Amerika Latin yang ingin kembali berkuasa. Selain itu, kasus kebijakan di Indonesia serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara konseptual dan empiris peran BLT sebagai alat mobilisasi massa strategis SBY, pada saat bertarung untuk periode keduanya (Sumarto, 2014).

Studi lainnya kompilasi Edward Aspinall dan Mada Sukmajati tentang penggunaan politik uang dalam Pemilu 2014 di berbagai daerah (Sukmajati dan Aspinall (eds), 2015). Dalam hal ini, mereka mengulas soal modus operandi politik uang dan bagaimana jejaring informal aktor dan broker-broker politik di daerah menciptakan hubungan patron-klien yang kental (Nasution, 2019). Dari beberapa perkembangan studi tersebut, petahana memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh lawannya, misalnya akses terhadap diskresi kebijakan yang dianggap menguntungkan secara elektoral. Namun, kandidat petahana juga memiliki kemungkinan mengalami kekalahan, sebab memiliki keterbatasan dan kutukan (Snyder, Andrew dan James, 2015). Kondisi tersebut, terjadi jika calon petahana dianggap memiliki kinerja yang rendah semasa jabatannya di kalangan pemilih.

Fenomena kekalahan petahana dalam penelitian ini mengambil latar belakang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dalam perkembangannya, cenderung banyak dilewatkan oleh banyak penulis. Dalam arti lain, studi kepetahaan lebih sering didominasi melalui latar belakang kontestasi eksekutif maupun legislatif, pada tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun pusat (Schumpeter, 2010). Padahal upaya yang demikian ini cenderung menyalahartikan upaya demokratisasi dan desentralisasi. Terlebih lagi, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam pengertian Joseph A. Schumpeter, keberadaannya (Pilkades) diartikan sebagai upaya pendewasaan demokrasi di Indonesia (Nasution, 2020b). Dengan demikian, sudah seharusnya Pilkades mendapatkan tempat yang strategis baik dalam lingkup politik praktis maupun perkembangan studi ilmu politik.

Pada Oktober 2019, Kabupaten Klaten mengadakan Pilkades serentak gelombang ke-3, Pilkades serentak ini diikuti oleh 77 desa, yang mana 62 di antaranya diikuti oleh calon Kepala Desa petahana. Hasil akhir menunjukkan bahwa sebanyak 36 Cakades petahana 58 % berhasil memenangkan kembali kontestasi dan sebanyak 26 Cakades petahana 42 % mengalami kekalahan. Dalam hal ini, tiga di antaranya akan menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu; 1) Desa Randusari; 2) Desa Jimbung; 3) Desa Jiwowetan. Ketiga desa tersebut dipilih, yakni karena dua alasan strategis, *Pertama*, cakades petahana di ketiga tersebut menggunakan patronase-klientalisme sebagai strategi mobilisasi massa. *Kedua*, kegagalan Cakades petahana mempertahankan kekuasaannya, yang menggambarkan paradoks kepetahaan. *Ketiga*, Cakades petahana melakukan praktik patronase-klientalisme, pembelian suara, pemberian barang pribadi dan kelompok tertentu, namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan kekalahan politik yang mereka dapatkan.

Fenomena terbalik dengan temuan Halili, misalnya, di Desa Pekandangan Barat Bluto, Sumenep, Madura (Halili, 2009) dan Fitriyah, pada kasus Pilkades di Kabupaten Pati (Fitriyah, 2015), yang menunjukkan bahwa pemilih tidak mau memilih kandidat yang tidak memberikan imbalan berupa materil. Ungkapan yang digunakan oleh para pemilih, misalnya, "*ora uwik ora obos*" (tidak ada uang tidak mencoblos) (Fitriyah, 2015). Dengan demikian, Kekalahan di tiga desa tersebut justru menunjukkan paradoks kepetahaan. Kendati pun, petahana yang memiliki banyak keuntungan, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan dan kutukan. Dengan demikian, bisa digunakan oleh para penantang untuk menganulir massa dukungan, jika mereka mampu mengeksplorasi segala bentuk keterbatasan dan kutukan tersebut (Nasution, 2020a).



Penelitian sebelumnya, Saragintan menemukan bahwa kecenderungan petahana menggunakan alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik (pork barrel) dengan menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang menyasar kelompok-kelompok keagamaan. Akan tetapi, strategi politik ini tidak berpengaruh dalam mempengaruhi sikap politik pemilih (Saragintan dan Hidayat, 2018). Lebih lanjut, penelitian Sholihah melihat bahwa terdapat kecenderungan buruk yang dihasilkan dari aktivitas elektoral yang bersifat transaksional, utamanya bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal (Sholihah, 2016). Selain itu, Edward Aspinall pada tahun 2019 melihat bahwa peran patronase-klientelisme di Indonesia cenderung menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam setiap kontestasi elektoral. Dalam hal ini, baik patronase-klientelisme yang didistribusikan melalui jaringan formal (birokrasi), non-formal (kemasyarakatan) maupun keduanya (Aspinall, Edward dan Ward Berenschot, 2019).

Selanjutnya, penelitian Noory Okthariza menemukan hubungan signifikan pada hubungan pemilih penerima uang atau barang dengan memilih kandidat tertentu. Bahkan membangun sarana umum menjelang Pemilu menunjukkan hasil yang justru akan menurunkan suara petahana. Lebih lanjut, studi Zadat Taqwa memberikan kesimpulan bahwa politik uang memiliki hubungan positif terhadap perilaku memilih (Taqwa, 2020). Pada akhirnya, peneliti ingin menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan studi pada ruang lingkup patronase-klientelisme dan kepetahanaan hanya di dominasi pada latar belakang politik elektoral pada level menengah hingga atas (Kabupaten/Kota hingga pusat). Namun demikian, perkembangannya sangat terbatas pada level elektoral di tingkatan paling bawah (pedesaan). Hal ini, yang mengakibatkan studi tentang desa hanya berkutat pada ruang lingkup yang sangat terbatas.

Studi tentang fenomena paradoks patronase-klientelisme dan kepetahanaan pada tingkat desa (Pilkades) masih sangat sedikit dilakukan. Maka penelitian ini layak untuk didistribusikan, sebab memiliki unsur kebaruan (novelty) yang dapat dicermati orisinalitasnya. Lebih lanjut, beberapa faktor yang melatarbelakangi Cakades Petahana dapat terpilih kembali. Dengan menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, dan pilihan rasional rasional dalam bingkai paternalistik dalam memahami orientasi pemilih pada tingkat Desa, terkhusus pedesaan Jawa. maka tulisan ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan paradoks kepetahanaan, yang menunjukkan bahwa pertimbangan kedekatan sosial, latarbelakang teritorial dan perbandingan matematis model kepemimpinan juga mempengaruhi orientasi pemilih pada tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data secara holistik dalam melihat fenomena sosial. Kondisi tersebut, penting untuk menjawab masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian kualitatif terdapat penelitian studi kasus yang digunakan peneliti dalam menganalisis topik tersebut (Creswell, 2016). Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara cermat tentang Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2019. Penelitian ini berlokasi di Klaten di tiga desa, yaitu; 1) Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi; 2) Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes; 3) Desa Randusari Kecamatan Prambanan.

Adapun informan penelitian terdiri dari cakades petahana, cakades penantang, tim sukses dan masyarakat/pemilih. Penelitian ini mencoba melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung, serta didukung data skunder (studi pustaka) dalam menjawab masalah penelitian. Selain itu, teknik analisis data model analisis interaktif Miles dan Huberman di gunakan dalam penelitian ini. Adapun tahapan teknik analisa data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles, M. B., Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Patronase-Klientelisme Pemilihan Kepala Desa Randusari Tahun 2019

Pada Pilkades Randusari, Soetardjo yang merupakan cakades dengan nomor urut satu keluar sebagai pemenang Soetardjo dengan perolehan suara sebesar 1.292 suara (60,5 persen). Sedangkan Harsih sebagai petahana kalah hanya memperoleh suara sebesar 818 suara (39,5

persen). Perolehan suara tersebut diraih dari total kehadiran pemilih 2.133 orang dari total seluruh DPT 2.538 orang atau setara dengan 84 persen. Pilkades Serentak Desa Randusari 2019, kental dibumbui praktik patronase-klientelisme. Praktik tersebut, terutama digunakan oleh cakades petahana Harsih. Adapun pola, jumlah dan jenis patronase-klientelisme yang digunakan beragam. Pola pertama yang digunakan Harsih adalah dengan memberikannya secara langsung dari pintu ke pintu. Pengamatan tersebut seperti yang disampaikan salah satu pemilih di desa Randusari yang mengatakan: “Kemarin itu ketika pemilihan, Bu Harsih ke rumah saya langsung, mas untuk memberikan sejumlah uang sekitar 200 ribu. Saya dan keluarga akan di berikan sejumlah uang, namun saya menolak karena takut, Mas. Saya berkata kepada Bu Harsih, tidak usah Bu, bila takdirnya Ibu menjabat lagi sebagai kepala desa pasti akan memenangkan kembali Bu”.

Pola kedua yang digunakan Harsih dengan memberikannya melalui perantara. Menurut salah satu tim pemenang Harsih, dirinya ikut membagikan uang secara langsung. Kondisi tersebut, diperkuat oleh pernyataan salah satu pendukung Harsih lainnya, yang menyatakan bahwa tim sukses Harsih membagikan sejumlah uang dari pintu ke pintu. Sementara itu, jumlah dan jenis patronase-klientelisme yang diberikan juga beragam. Jumlah dan jenis patronase-klientelisme tersebut merujuk pada pemaknaan patronase-klientelisme menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. Patronase yang diartikan sebagai proses pertukaran keuntungan demi memperoleh keuntungan politik.

Sementara itu, kontestasi Pilkades yang bersifat antar kandidat cenderung menguntungkan kandidat petahana karena cenderung dapat memenangkan pertarungan (keuntungan kepetahanaan). Hal tersebut, karena kandidat petahana memiliki jaringan yang telah terbentuk, pengalaman, keuangan dan aksesibilitas terhadap patronase-klientelisme, diskresi kebijakan, yang bersifat non-programatik kepada kelompok-kelompok tertentu, yang dianggap menguntungkan petahana secara elektoral. Namun, petahana juga memiliki keterbatasan dan kutukan yang dapat memberikan dampak negarit secara elektoral. Kondisi ini, berlaku jika kandidat lain dapat mengeksplorasi potensi keterbatasan dan kutukan tersebut. Keterbatasan dan kutukan tersebut dapat berdampak pada perilaku memilih masyarakat. Pada periode kepemimpinannya, Harsih dinilai banyak melakukan nepotisme dengan menjadikan anak-anaknya sebagai perangkat desa. Hemat penulis, senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu pemilih di Desa Randuasari, yang mengatakan:

“Saya itu ingin desa ini lebih bersih, Mas, lebih maju. Sekarang begini mas coba saja ketika menjabat kepala desa, anak-anak nya di berikan jabatan sebagai Badan Pengawas Desa dan menjabat sebagai carik/sekertaris desa gimana mau bersih pemerintah nya mas?”.

Masyarakat menaruh simpati pada awal pencalonannya dulu karena menilai Harsih sebagai sosok yang berpendidikan. Harsih juga berjanji yang berkomitmen dalam memajukan dunia pendidikan, namun yang terjadi justru menempatkan anak-anaknya sebagai perangkat desa. Isu tersebut, kemudian menjadi buah bibir di masyarakat dan efektif dalam menjaring simpati masyarakat. Hal ini karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun politik biasanya mendapat cakupan pemberitaan yang besar, sehingga lebih dapat menyedot atensi masyarakat. Atensi ini menjadi modal strategis dalam pendekatan sosilogis terkait dengan penguasaan teritorial mobilisasi massa. Oleh sebab itu, banyak dari para simpatisan Soetardjo yang menjadikan isu ini sebagai bahan obrolan di pos ronda dan warung-warung kopi, seperti yang diungkapkan calon Kepala Desa Randuasari Soetardjo yang mengatakan:

“Kalo saya pribadi lebih seneng nongkrong bareng-bareng di pos ronda dan warung sambil ngobrol saya bersosialisasi sekaligus bercerita bahwa Kepemimpinan Harsih itu bobrok, busuk. Cara yang efektif untuk mempengaruhi orang dengan cara begitu, Mas”.

Selain menjadi basis isu dalam penguasaan teritorial, isu tersebut juga menjadi pertimbangan utama masyarakat tentang maksimalisasi manfaat. Oleh karena itu, pilihan rasional dilandasi kepada hasil yang dicapai oleh kandidat, bukan untung-rugi yang bersifat materil. Dalam hal ini, masyarakat merasa telah dikhianati oleh janji kampanye Harsih pada awal pencaloannya. Berikut penuturan salah satu pemilih di Desa Randusari yang mengatakan:

“Wah, saya itu tertipu dulu, Mas karena orangnya berlatar belakang dari dunia pendidikan dan pintar ya setahu saya bisa membuat desa ini maju malah tidak karuan, membohongi rakyat nya”

Nepotisme yang menghiasi dinamika kepemimpinan Harsih, juga melahirkan penilaian masyarakat kepadanya bahwa tidak bisa mengayomi (*ngopeni*) dan memberikan nasihat. Oleh karena itu, masyarakat menilai tidak merasa dekat atau merasa memiliki kepada Harsih. Padahal peran mengayomi dan memberikan nasihat merupakan peran yang sangat penting dalam model kepemimpinan di tingkat desa, utamanya di Jawa. Hal ini karena model kepemimpinan di tingkat desa di Jawa sangat kental dengan kultur paternal atau bersifat paternalistik. Paternalistik dalam hal ini, tidak selalu merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan gender (bias gender). Tetapi lebih kepada, sosok pemimpin baik itu laki-laki ataupun perempuan harus mampu mengayomi sekaligus menjadi penasihat bagi masyarakat.

Pola aktivitas kampanye yang dilakukan Sutardjo kemudian melahirkan gerakan kesukarelaan. Banyak warga yang datang ke rumahnya untuk memberikan sumbangan, berupa uang, makanan maupun minuman. Soetardjo juga mengungkapkan bahwa awalnya dirinya hanya membentuk tim relawan berjumlah lima orang untuk masing-masing RT (165 orang), kemudian banyak yang masyarakat yang datang untuk bergabung. Pada akhirnya terbentuk tim relawan lebih kurang menjadi 360 orang. Melalui pendekatan psikologis tersebut, Soetardjo membangun modal sosialnya, sehingga berhasil meraup kemenangan suara secara maksimal. Berikut penuturan Harsih tentang kondisi perolehan suara saat Pilkadaes:

“Saya di sini kalah, Mas di TPS tetangga di sekitar sini saya kalah 50 suara. Di daerah saya tinggal ini TPS 01, Mas. Di TPS 02 di tengah-tengah desa saya kalah 150 an orang. Di TPS 03 paling akhir ujung desa saya kalah telak, banyak banget saya kalah di sana padahal saya kasih perhatian khusus saat kampanye”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perilaku memilih masyarakat bersaling-kelindan. Artinya, ketiga model perilaku memilih tidak saling mengeliminasi, justru saling berhubungan. Hubungan ini dilandasi isu nepotisme terhadap kepemimpinan Harsih, yang kemudian dijadikan sebagai alat penguasaan teritorial para pendukung Soetardjo. Sehingga berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Harsih karena dianggap telah lalai dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu dan menganggapnya tidak mampu mengayomi sekaligus memberi nasihat. Modal penting bagi Soetardjo untuk melakukan pendekatan secara psikologis kepada masyarakat dengan aktif melakukan kunjungan dari pintu ke pintu, memberikan pelayanan maupun hadir dalam acara sosial-keagamaan. Upaya yang dilakukan Soetardjo, pada akhirnya melahirkan gerakan kesukarelaan masyarakat untuk mendukungnya, baik secara materil maupun non-materil.

Praktik Patronase-Klientelisme Pemilihan Kepala Desa Jimbung Tahun 2019

Pilkades Serentak Jimbung 2019, diikuti oleh dua pasang calon, yakni Siti Sumarsih, yang merupakan cakades petahana nomor urut satu, melawan Padiyo, cakades nomor urut dua. Siti Sumarsih merupakan warga asli yang bertempat tinggal di Surobajan, RT 005 RW 015. Memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan SMA dan juga aktif berorganisasi politis maupun bisnis. Berbagai keterlibatan dalam organisasi politik dan bisnis ini karena akses politik suaminya, yakni Sugeng Widodo, yang merupakan mantan kades (1998-2006). Lawan politiknya, yakni Padiyo, merupakan warga asli yang bertempat tinggal di Njimbung, RT 001, RW 011. Padiyo memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan SMA, serta bekerja sebagai peternak burung jalak suren dan ikan gurami.

Sementara itu, Pilkades Serentak Jimbung 2019, turut diwarnai praktik patronase-klientelisme. Jika merujuk pada pemaknaan patronase-klientelisme yang mengartikannya sebagai proses pertukaran keuntungan demi memperoleh politik dalam bentuk pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok dan proyek-proyek gentong babi, maka Pilkades Serentak Jimbung 2019, hanya turut diwarnai praktik pembelian suara, pembelian barang-barang terhadap kelompok dan proyek-proyek gentong babi.

Dalam hal ini, data terkait pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas tidak ditemukan.

Selanjutnya, menurut pengakuan salah satu tim pemenang Padiyo, mengungkapkan bahwa Siti Sumarsih membagikan uang sebesar 25 ribu rumah di daerah tempat tinggalnya. Selain di daerah tempat tinggalnya, mereka tidak berani memberikan kesaksian karena tidak melihatnya secara langsung. Praktik pembelian suara secara masif tidak dilakukan oleh Siti Sumarni. Menurut penuturannya, dirinya lebih suka memberikan uang untuk kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, jenis patronase-klientelisme lainnya yang digunakan adalah barang-barang kelompok yang menysasar kelompok tani, PKK, kelompok pengajian ibu-ibu dan kelompok keagamaan. Pendapat tersebut, senada dengan Ketua Tim Sukses Siti Sumarsih yang mengatakan:

“Kepada tim sukses ya ga ada, Mas, Cuma ya itu bantuan untuk kelompok tani saya 700 ribu itu sebelum cuti kampanye, saat kampanye tidak bagi apa-apa”

Sementara itu, Ketua Tim Sukses Sumarsih juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima bantuan sebesar 35 juta untuk membeli sapi yang diperuntukkan untuk kelompok tani binaannya. Lebih lanjut, delapan kelompok tani yang lain juga sempat menerima bantuan. Selain itu, terkait dengan pemberian kepada kelompok PKK, disampaikan oleh kader PKK, yang merupakan anggota PKK sekaligus salah satu tim sukses Siti Sumarsih. Dalam wawancaranya, salah satu Kader PKK, mengatakan:

“Bu Kades membagikan uang sebelum cuti kampanye pemilihan dan memberikan uang tersebut melalui kelompok Ibu-Ibu PKK, sejumlah 800 ribu per kelompok PKK. Saya juga mendengar dari Ibu-Ibu PKK di RT lain, bila Bu Kades memberikan ke kelompok lain ada yang sekitar 1 jutaan, mas”.

Latar belakang akan keterdesakan ekonomi, masyarakat dengan struktur sosio-ekonomi rendah akan mudah menerima patronase-klientelisme (Sumarto, 2014). Lebih lanjut, kompetisi antar kandidat yang kompetitif dipengaruhi modal yang dimiliki oleh kandidat itu sendiri. Dengan demikian, kandidat cenderung akan melakukan segala cara, terutama bagi kandidat yang memiliki kemampuan untuk menggunakan modal, sebagai fundamen strategi mobilisasi masa. Kendatipun, Siti Sumarsih memiliki latar belakang politik sebagai kader parrtai dan menaruh hubungan dekat dengan beberapa anggota DPR, namun proyeksi masyarakat dalam konteks Pilkadaes berbeda dengan kontestasi Pemilu. Latar belakang politik tersebut justru menjadi senjata makan tuan bagi Siti Sumarsih karena masyarakat menilai integralisasi penyelenggaraan politik-pemerintahan Desa sarat dengan kepentingan politik parpol tertentu dan justru tidak etis, sehingga, masyarakat menilai Siti Sumarsih tidak memiliki keberpihakan penuh terhadap mereka.

Latar belakang organisasi politik Siti Sumarsih dan kedekatannya dengan parpol tertentu menjadi penilaian logis tersendiri bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai posisi Siti Sumarsih sebagai Kades tidak netral. Dengan menggunakan CV miliknya dan menempatkan anaknya sebagai aktor operasional, Siti Sumarsih melakukan nepotisme terhadap proyek-proyek pemerintahan yang masuk ke Desa, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Ketidaknetralan politik tersebut pada akhirnya menjadikan akumulasi kekayaan hanya berpusat pada dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat menilai jabatan Kades yang diembannya hanya dijadikan sebagai alat memperoleh kekayaan materil secara parsial. Hemat penulis, dapat dibuktikan dengan pernyataan Ketua Karang Taruna Desa Jimbung:

“Saya itu netral saja, Bu Marsih itu bagus dulu itu saya tim TPK, Tim Pelaksana Kegiatan di Desa. Kalo soal penertiban birokrasi, Bu Marsih itu bagus, tapi dia makan buah simalakama sendiri karena semisal ada kegiatan pembangunan apa, jadi dia mendelegasikan anaknya untuk membangun proyek, Mas. Semisal jalan nanti anaknya yang garap beberapa titik dengan menggunakan beberapa CV jadi saya itu sebetulnya gimana yah, saya juga jadi TPK tapi itu ditunjuk beliau, tapi terlalu parah karena terlalu banyak yang digarap anaknya. Bagi-bagi kuenya tidak merata istilahnya jadi ya banyak yang memusuhi”.

Selanjutnya, Siti Sumarsih juga melakukan praktik monopoli operasional tanah bengkok desa. Padahal, Siti Sumarsih, ketika awal pencalonannya dulu berjanji akan membagikan

pengelolaan tanah kas desa kepada setiap RW, per patok (1.900 meter persegi). Hemat penulis, dibenarkan oleh Siti Sumarsih yang mengakui bahwa penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok desa tersebut digunakannya sebagai modal kampanye, berikut pernyataan Siti Sumarsih:

“Kalo tanah kas desa itu kan luas banget, kalo untuk warga saya sewakan untuk pertanian. Tanah bengkok saya kelola ditanam padi. Cuma ya kalo mengharapkan dari hasil panen ya susah. Kalo musim kemarau begini ya gak ditanami. Kalo jadi kades itu harus siap rugi. Ya dari hasil tanah bengkok saja gak menutupi, kalo untuk modal kampanye. Ada juga itu tanah Desa saya buat untuk BUMDes, juga untuk perumahan warga disewakan tapi tidak menjadi hak milik”.

Praktik kekuasaan yang dilakukan Siti Sumarsih, akhirnya melahirkan barisan sakit hati, terutama bagi pihak-pihak yang pernah dijanjikannya secara langsung, seperti Pamong Desa, Ketua RT dan Ketua RW serta para tim suksesnya terdahulu. Mereka lantas memutarbalikkan dukungan kepada Padiyo. Dukungan ini menjadi modal utamanya sebagai penguasaan terhadap teritorial secara sosiologis. Kendatipun, Padiyo tidak terlalu intensif melakukan kampanye dari rumah ke rumah, kehadiran barisan sakit hati memberi pengaruh signifikan mendorong kemenangan politiknya. Kondisi tersebut, disebabkan masyarakat lebih mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ketua RT dan RW. Dengan demikian, para Ketua RT dan RW mensosialisasikan perihal isu-isu utama yang terjadi di sekitar kekuasaan Siti Sumarsih. Berikut pernyataan ketua RT 003 RW 011 Desa Jimbung yang mengatakan:

“Kalau menurut saya ya kesalahan Bu Sumarsih itu ya gak memperhatikan orang-orang yang sudah mendukung dia dulu ya. Tim suksesnya yang kemarin aja yang dulunya digunakan untuk melawan Pak Padiyo dulu, dulu kan Pak Padiyo nyalon kades juga eh malah sekarang memihak Pak Padiyo. RT RT di sini ketua RTnya nggih dukung Pak Padiyo, ya mungkin mereka pernah dikecewakan”.

Maka dengan adanya manajemen isu yang masif dan terstruktur yang dikelola oleh para barisan sakit hati Siti Sumarsih, menjadi modal politik penting bagi Padiyo untuk melakukan mobilisasi massa melalui pendekatan sosiologis (penguasaan teritorial) dan pilihan rasional. Padiyo juga tidak terlalu intensif dalam melakukan pendekatan-pendekatan psikologis, seperti mendatangi atau ikut serta dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan dan sosial-keagamaan, namun masyarakat yang datang ke rumahnya. Mereka berkumpul secara sukarela dengan gotong-royong membawa makanan atau minuman sendiri-sendiri. Kendatipun, Padiyo juga tidak dapat memungkiri harus mengeluarkan biaya untuk membeli makanan dan minuman untuk menjamu masyarakat yang datang. Oleh karena itu, tidak cukup mengherankan jika Padiyo hanya menghabiskan modal materil sebesar 30 juta rupiah (Padiyo, 28 Agustus 2020).

Kontestasi Pilkades yang bersifat antar kandidat cenderung menguntungkan kandidat petahana, sebab memiliki jaringan yang telah terbentuk, pengalaman, keuangan dan aksesibilitas terhadap patronase-klientelisme. Namun kandidat petahana juga memiliki keterbatasan dan kutukan yang dapat memberikan dampak negatif secara elektoral. Jika, keterbatasan dan kutukan tersebut dapat dieksplorasi dengan baik oleh penantang, maka akan mempengaruhi perilaku memilih pemilih terhadap petahana. Praktik nepotisme yang berujung pada akumulasi kekayaan pada dirinya, menjadi penilaian utama tentang untung-rugi masyarakat terhadap Siti Sumarsih. Kondisi tersebut, mempengaruhi masyarakat menentukan pilihannya secara rasional.

Praktik Patronase-Klientelisme Pemilihan Kepala Desa Jiwowetan Tahun 2019

Pilkades Serentak Jiwowetan 2019, diikuti oleh dua Cakades, yakni Sumarni sebagai petahana dan Dalikir sebagai penantang. Sumarni bertempat tinggal di RT 002, RW 003, sekaligus menjadi Ketua RW setempat (sebelum menjabat sebagai Kades). Latar belakang pendidikannya merupakan lulusan Diploma III (D-3) Ekonomi. Selain itu, Dalikir merupakan warga asli Jiwowetan yang bertempat tinggal di RT 001, RW 005. Sejak lulus dari STM, Dalikir memilih untuk merantau menjadi kuli bangunan dan buruh di beberapa perusahaan dan daerah. Pekerjaannya sebagai buruh, maka Dalikir tercatat menjadi anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Selanjutnya, Pilkades dimenangkan oleh Dalikir, Cakades nomor urut satu dengan memperoleh 817 suara (57,7 persen). Sedangkan Sumarni, harus rela menelan kekalahan dengan



hanya memperoleh 554 suara (42,3 persen). Jumlah suara tersebut diperoleh dari 1418 DPT yang menggunakan hak pilihnya. Pada kenyataannya, praktik patronase-klientelisme dilakukan secara dominan oleh Sumarni. Hal ini, karena petahana memiliki aksesibilitas terhadap diskresi kebijakan. Lebih lanjut, praktik pembelian suara dilakukan Sumarni dengan memberikan uang sejumlah 50 ribu sampai 100 ribu rupiah. Hemat penulis, merujuk pernyataan salah satu tim sukses Sumarni yang mengatakan:

“Saya memang membagikan uang ke warga yang saya kenal dekat. Memang saya di beri perintah seperti itu oleh Bu Sumarni, amanah tersebut saya sampaikan, seperti saya ini dipasrahi untuk mbagi 50 sampai 100 ribu per orang ya saya bagi segitu. Saya kemarin di pasrahi untuk membagikan 30 orang, Mas. Untuk saya bagikan ke tetangga yang kenal dekat dengan saya dan saudara saya”.

Sementara itu, praktik pemberian barang-barang pribadi diberikan dalam bentuk beras, Selain itu, Sumarni juga memberikan langsung kepada rumah tangga tidak mampu menggunakan anggaran pribadi. Lebih lanjut, pemberian barang terhadap kelompok diberikan Sumarni dengan menysasar kepada kelompok keagamaan dengan menggunakan dana Desa. Berikut wawancara dengan salah satu pemilih Desa Jiwowetan mengatakan:

“Kalo masjid diberi bantuan sudah memang selayaknya sebagai Kades membantu. Tapi itu kan dana Desa, bukan pribadi dia. Pernah masjid diberi bantuan tapi melalui pengurus lainnya ya bukan saya, ya untuk sekedar membantu saja. Waktu itu dibantu uang, jumlahnya satu juta tapi ya gak sering, sekali dua kali, sama membantu semen, tapi menurutnya itu tidak mengarahkan untuk memilih dia, ya dia tau sendiri lah masjid tidak boleh untuk sarana politik”.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka berangkat dari konsepsi struktur sosio-ekonomi dan kompetisi antar kandidat yang melibatkan kontestasi melawan petahana, Sumarni dengan segala aksesibilitasnya melakukan praktik patronase-klientelisme sebagai upaya positif terhadap kebutuhan elektoralnya. Hal ini, tentu saja berimplikasi pada biaya kampanye yang dikeluarkan Sumarni, yang dibbilang cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Berbeda signifikan dengan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh Dalikir, yang hanya mencapai 40 juta rupiah, yang mana uang tersebut didapatkan dari anaknya yang mengajukan pinjaman bank. Adapun polanya dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran broker dalam membentuk tim sukses.

Berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan dan kutukan yang paling berpengaruh adalah model kepemimpinan Sumarni ketika menjabat. Dalam hal ini, Sumarni dinilai arogan (tidak grapyak). Oleh karena itu, banyak masyarakat yang awalnya memilih Sumarni, kemudian membalikkan pilihannya kepada Dalikir. Terkait arogansi tersebut, salah satu pemilih Desa Jiwowetan menyatakan sebagai berikut:

“Sumarni itu adik saya, tetapi saya justru memilih Dalikir. Ya saya dukung karena banyak masyarakat di sini kurang suka dengan arogansi adik saya itu. Katanya sih ada warga yang dipersulit ketika mengurus yang program sertifikasi tanah gratis dari Pak Jokowi itu, Intinya sih minta goro itu. Poligoro ya masyarakat akhirnya mau tidak mau memberi. Terpaksa juga karena mengadu pun percuma, suaminya kan jaksa juga”.

Pada kondisi tersebut, Dalikir hadir melakukan diferensiasi politik sebagai cakades yang paling dekat dengan sifat kebapakan. Oleh karena itu, Dalikir mampu mendekatkan diri kepada pemilih secara psikologis. Pendapat tersebut senada dengan salah satu pemilih Desa Jiwowetan mengatakan:

“Ya kalo Kades kemarin itu kinerjanya kurang, kurang mengayomi nggih. Kalo Pak Dalikir itu kan sering kumpul-kumpul, sama warga kalo malem itu nongkrong di pos ronda yang besar itu. Terus dia itu berangkat dari wong cilik seperti saya ini, jadi lebih tau rasanya jadi orang kecil. Kalo Bu Sumarni itu kan orang kaya jadi kurang peka sama wong cilik”.

Kebiasaan berkumpul yang dilakukan Dalikir juga berpengaruh dalam melahirkan gelombang kesukarelaan. Hal ini didukung dengan prinsip kampanyenya yang berpegang pada istilah Jawa, “*Tan ono roso olo maring atiniro,*” (tidak pernah berprasangka buruk kepada siapapun walaupun



orang tersebut jahat pada dirinya). Oleh karena itu, Dalikir berhasil meraih dukungan dari berbagai latar belakang, seperti pemuda, sesepuh desa, hingga preman. Kendatipun Dalikir tidak memiliki tim sukses, tetapi banyak masyarakat yang akhirnya mendukung secara sukarela kepada dirinya. Hal ini, sangat penting sebagai modal penguasaan teritorial dalam pendekatan sosiologis. Hemat penulis, senada dengan Dalikir yang menyatakan:

“Tim sukses sama sekali tidak ada. Warga itu yang inisiatif bergerak bantuin saya, saya paling itu relawan yang membantu. Coba aja nanti wawancara ke warga betul tidak waku malam-malah pada berkumpul menghalau money politic dari lawan sewaktu pemilihan. Karena warga sendiri yang inisiatif mengkampanyekan saya ya mereka sendiri tanpa uang bergerak, saya aja sampe tidak menyangka. Kemarin itu betul-betul rame dan menegangkan karena warga sendiri yang menghendaki ganti pemimpin di Desa. Jadi, kalo membentuk tim sukses pun saya tidak ada itu”.

Keterbatasan ekonomi yang dialami Dalikir justru menjadi keuntungan politik bagi elektoralnya. Hingga akhirnya banyak warga membantu kandidasinya secara materil, seperti membeli makanan-minuman setiap kali diadakan perkumpulan di rumahnya. Dalikir juga mampu memobilisasi dukungan besar tanpa harus mengeluarkan biaya politik yang besar. Berikut alasan salah satu pemilih Desa Jiwowetan memilih Dalikir:

“Masih bersih orangnya, sederhana juga kalo dibilang Kades yang miskin ya dia mungkin. Saya aja ke sana bawa snack jajanan untuk warga yang berjaga di pos ronda menghalau adanya serangan fajar dari Bu Sumarni. Jadi, ceritanya kemarin warga itu inisiatif untuk bergadang, kami semua saling berjaga dan keliling Desa secara bergantian di malam hari sampai menjelang waktu pencoblosan barang kali ada yang bagi uang untuk memenangkan Bu Sumarni”.

Berdasarkan hal tersebut, maka arogansi kepemimpinan selama masa jabatan Sumarni, dijadikan pijakan strategis bagi Dalikir untuk mengeksplorasi keterbatasan dan kutukan kepetahanaan tersebut sebagai peluang mendapatkan kemenangan. Dalam hal ini, Dalikir melakukan diferensiasi politik dengan hadir sebagai Cakades yang bersifat kebabakan. Hal tersebut mampu menarik dukungan secara psikologis, sehingga sekalipun pada awalnya Dalikir tidak memiliki tim sukses, hingga akhirnya melahirkan gerakan kesukarelaan masyarakat. Adapun gerakan ini dipengaruhi latar belakang lapisan masyarakat, seperti pemuda, ibu-ibu, sesepuh desa hingga preman-preman. Arogansi kepemimpinan Sumarni juga menjadi parameter untung-rugi bagi masyarakat. Sekalipun masyarakat diberikan imbalan berupa patronase-klientelisme, tetapi mereka merasa dirugikan dengan model kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, parameter untung-rugi diukur dari keuntungan dan kerugian yang bersifat immateril.

SIMPULAN

Pilkades Serentak Randusari, Jombang dan Jiwowetan 2019 sarat praktik patronase-klientelisme. Jenis patronase-klientelisme yang digunakan cukup beragam berdasarkan jenis, maupun aktor yang berhubungan langsung dengan pemilih. Praktik patronase-klientelisme pada ketiga Desa, tidak mampu mendorong kandidat petahana memenangkan hasil Pilkades tersebut. Para penantang berhasil mengeksplorasi keterbatasan dan kutukan (*scare-off*) yang ada pada diri petahana. Sehingga mampu merubah perilaku memilih masyarakat melalui pendekatan psikologis, sosiologis dan pilihan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. & W. B. (2019). *Democracy For Sale Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aspinall, E. dan M. S. (2015). *Politik Uang Di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (1st ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, F. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 101-111.

- Halili, O. (2009). PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 14(2).
- Hall, A. (2008). Brazil's Bolsa Família: A double-edged sword?. *Development and change*, 39(5), 799-822.
- Harahap, H. I. (2019). Hate Speech in Election: Increasing Trends and Concerns. In 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018) (pp. 44–46). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.10>
- Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308.
- Sugiyama, N. B., & Hunter, W. (2013). Whither Clientelism? Good Governance and Brazil's Bolsa Família Program. *Comparative Politics*, 46(1), 43-62.
- Lipset, M., B. (2012). "The Study of Electoral Behaviour." In *The Oxford Handbook of American Election and Political Behaviour*. Oxford: Oxford University Press.
- Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. *The American political science review*, 53(1), 69-105.
- Miles, M. B., Huberman, M. & S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (H. Salmon, Ed.) (3rd ed.). London: SAGE.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 369.
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 227–235. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015>
- Nasution, F. A. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020: Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 97–113. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Nasution, F. A., & Taher, Z. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 55–60. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.%25p>
- Nugroho, A. (2019). Pilkades di Kediri: Siap "Modal" sampai Rp 1 Miliar.
- Okthariza, N. (2019). Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa. *CSIS Election Series No. 3*.
- Roth, D. (2008). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friderich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). Indonesia: Personalities, Parties, and Voters. *Journal of democracy*, 21(2), 35-49.
- Schumpeter, J. A. (2010). *Capitalisme, Socialism and Democracy*. London: Routledge.
- Setiawan, R. B. (2018). Strategi Dan Pola Jaringan Klientelisme Dalam Pemenangan Pasangan Petahana Idza Priyanti Dan Narjo Pada Pilkada Brebes 2017. Universitas Jenderal Soedirman.
- Snyder, A. B. H. dan J. M. (2015). How Much of the Incumbency Advantage is Due To Scare-Off? The European Political Science Association.
- Sukmajati, E. A. & M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 (Cetakan I)*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Sumarto, M. (2014). *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taqwa, Z. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Klientelistik Masyarakat Di Desa Sawangan Wetan Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019. Universitas Jenderal Soedirman.
- Westwood, R. I. (1992). Headship and Leadership. In *Organisational Behaviour: Southeast Asian Perspective (118–143)*. Hongkong: Longman.

